RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

TAHUN 2022

"MENUJU MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA"

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

JL. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 14 BANDA ACEH – 23242
TELP. (0651) 22146, FAX (0651) 33615

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan Program kerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022, serta sebagai acuan untuk tahap pembangunan tahun selanjutnya. Terima kasih

Banda Aceh, 09 Juli 2021
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Persandian Aceh

PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA & PERSANDIAN

Marwan Nusi, S, B.Hsc, MA
NIP. 19710[illegible]1 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2020
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022 (Tabel Terlampir) 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh (Tabel Terlampir) 7
2.3 Isu-isu Penting Pelayanan Perangkat Aceh 9
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPA 12

BAB III TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA 14
3.3 Program dan Kegiatan 15

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH (Tabel Terlampir)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi, pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat dan keamanan informasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang membidangi komunikasi informatika dan persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfosandi maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPA.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi RENJA Dinas adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA Dinas memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Dinas.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja SKPD, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh 2022. Selanjutnya, setiap Seksi menyusun rancangan Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing beserta anggaran yang diperlukan. Hasil rancangan Rencana Kerja dari tiap-tiap Seksi kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo dan Sandi Aceh Tahun 2022 ini ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mendasari Rencana Kerja Diskominfo dan Persandian Aceh Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2053 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
19. Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
21. Qanun No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Aceh (RPJMA) 2012 – 2017;
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan TIK;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam melakukan penyusunan program/kegiatan Renja Tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah sebagai salah satu dasar untuk penyusunan renja selanjutnya di tahun 2023. Penyusunan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) yang nantinya di tuang ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Pemerintah Aceh terdiri dari :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2020
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022 *(Tabel Terlampir)*
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh *(Tabel Terlampir)*
- 2.3 Isu-isu Penting Pelayanan Perangkat Aceh
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Aceh
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH (tabel terlampir)

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN LALU DAN RENSTRA PERANGKAT ACEH TAHUN 2017-2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2020 dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2020

Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal sebagai berikut, sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPA dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menetukan arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 berjumlah Rp. 42.381.750.326,- dengan sumber dana berasal dari DAU, PAA, SILPA MIGAS DAN SILPA OTSUS dengan rincian masing-masing alokasi anggaran sebagai berikut adalah :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	**ACEH**	**42.381.750.326,-**
	GAJI/TUNJANGAN	**13.793.646.107,-**
	- PAA	6.697.779.076,-
	- DAU	7.095.867.031,-
	-	
	RUTIN	**28.588.104.219,-**
	OPERASIONAL/PEMBANGUNAN	
	- DAU	2.071.105.960,-
	- SILPA MIGAS	6.180.158.387,-
	- SILPA OTSUS	20.336.839.872,-
	TOTAL	**42.381.750.326,-**

B. Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Bidang PP BAPPEDA
								Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
								Target	Target	Target	Target	Target	
1				2	3	4	5	6	8	10	12	14	19
1	2	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	P2KSDM
1	2	10	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	P2KSDM
1	2	10	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%	100	-	-	100	100	100	P2KSDM
1	2	10	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	P2KSDM
1	2	10	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)	%	100	-	-	100	100	100	P2KSDM
1	2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Serta Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	%	85	85	85	85	85	85	P2KSDM
1	2	10	17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Orang	14	150	180	190	200	220	P2KSDM
1	2	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa dan Jumlah Mas Media yang memuat berita	%	85	85	85	85	85	85	P2KSDM
1	2	10	19	Program Pengembangan Data dan Statistik	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) dan Jumlah Informasi Publik yang diakses	%	85	85	85	85	85	85	P2KSDM
1	2	10	20	Program pengembangan data dan informasi secra terpadu	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	%	85	-		75	80	90	P2KSDM

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA

Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan Pemerintah Aceh, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh-* memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian;
4. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas Kabupaten/Kota;
5. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
6. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
7. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian mencakup wilayah Provinsi;
8. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
9. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
10. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;

Kewenangan Diskominsa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan

kepemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominsa Aceh

Sesuai dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa), maka dirumuskan permasalahan visi dan misi serta permasalahan tersebut ke dalam bentuk yang terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran dinas.
Adapun tujuan Diskominsa mengacu pada Qanun Nomor 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan komunikasi, informatika persandian dan statistik
2. Penyelenggaraan urusan umum dan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
5. Pelaksanaan pengasawan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Berbagai kondisi yang ada di bidang urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian yang perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut dapat diuraikan berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

A. Bidang Teknologi Komunikasi & Informatika dan Informasi Publik

Perkembangan Teknologi Informasi pada era ini menjadikan salah satu faktor utama dalam hal berkembangnya tingkat kebutuhan yang tinggi di sektor komunikasi, informatika dan persandian. Kebutuhan komunikasi dengan baik dan memperoleh informasi yang akurat terkini merupakan kebutuhan alamiah masyarakat yang terus berkembang dan mengalami peningkatan dalam pemenuhannya. Beberapa permasalahan yang ditemui di sektor ini antara lain :

1. Sebagai payung hukum dalam sektor komunikasi dan informatika, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih belum maksimal, masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya dalam hal berkomunikasi dan memperoleh informasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dibutuhkan peran aktif serta dukungan dari Pemerintah untuk mensosialisasikan dan menerapkannya secara aktif.
2. Salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah sistem komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan), agar komunikasi dan informasi yang berkembang dan diterima dapat diarahkan secara tepat dan terarah, dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya system komunikasi jaringan yang tepat.

Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat akan kegiatan pemerintahan dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya.

B. Bidang Komunikasi Publik

1. Dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya sistem komunikasi dari satu arah menuju ke berbagai arah (jaringan);
2. Masih terbatasnya penerapan teknologi komunikasi dan informasi, dalam mendukung operasional di sektor komunikasi, informatika dan persandian;
3. Perkembangan masyarakat yang kritis menuntut tersedianya media dan fasilitas sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan sehingga diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya .
4. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang masih terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali akibat disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan.
5. Pelayanan bidang komunikasi, informatika dan persandian terhadap kelompok masyarakat tertentu seperti penyandang cacat, gender dan

anak-anak serta lanjut usia belum mendapatkan perhatian yang memadai.

6. Pengembangan manajemen informasi yang berbasis *open data* di lingkungan Pemerintah Aceh.
7. Sosialisasi manajemen informasi yang berbasis *open data* di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan Produksi Konten Digital Pemerintah Aceh seperti iklan layanan digital, produksi film dan video digital, perpustakaan digital, serta pelayanan pelayanan digital lainnya yang dipandang menyangkut kegiatan pemerintahan.
9. Peningkatan SDM terkait pengelolaan data dan integrase aplikasi, serta peningkatan SDM di bidang keamanan informasi E-Government.
10. Pelaksanaan FGD terkait mapping aplikasi dan pembentukan kesepahaman kelola data terintegrasi antar Dinas/Badan/Lembaga
11. Integrasi Kelompok Aplikasi Dasar dan Layanan
12. Pembuatan Aplikasi Tatap Muka Data yang Terintegrasi
13. Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi E-Government
14. Pembentukan Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi
15. Kesadaran Keamanan Informasi dan Internet Sehat di lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota

C. Bidang Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian pada dinas komunikasi, informatika dan persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa isu permasalahan terkait persandian adalah :

1. Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi
2. Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi SDM Aparatur di sektor persandian. Selanjutnya, perangkat persandian yang ada saat ini belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan AkhirRKPA

Hasil review Rancangan Akhir RKPA terdapat tantangan dan kemajuan yang telah dicapai hingga tahun 2016. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) disusun berdasarkan perumusan strategi pembangunan didasarkan antara lain pada analisis gambaran umum dan kondisi daerah serta analisis ekonomi dan keuangan daerah. Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil analisis tersebut yang dilanjutkan kepada proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi diperlukan mengingat fak-tor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan.

Strategi yang diterapkan dalam sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Aplikasi E-Government;
7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008;
9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian
10. Manajemen Informasi yang berbasis *open data*
11. Pengembang Konten Digital Pemerintah
12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

Selanjutnya berdasarkan strategi yang ditetapkan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh akan menyusun program dan kegiatan yang secara bertahap dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

BAB III
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sarana komunikasi baik melalui media baru seperti internet maupun media tradisional yang sempat berkembang pada masa sebelumnya. Pengembangan sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi dan upaya pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Keberadaan berbagai media komunikasi tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Hubungan Masyarakat di Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan media-media apa saja yang dirasa efektif untuk menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022 lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat di tingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan. Pelaksanaan program diprioritaskan pula untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi SPM, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga diarahkan untuk sejalan dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ACEH yaitu untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan di sektor Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diuraikan sebagai berikut :

1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Aplikasi E-Government;

7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008;
9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur dan Peralatan Yang Mendukung di bidang Persandian
10. Manajemen Informasi yang berbasis *open data*
11. Pengembang Konten Digital Pemerintah
12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022 adalah sebagai bagian dari Qanun RPJMA Tahun 2017 – 2022. Adapun yang menjadi visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh adalah *"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani".*

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

MISI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Sektor Informasi Dan Komunikasi Publik

Membangun jaringan informasi dan mengintegrasikan data kelompok-kelompok informasi masyarakat sebagai penggerak forum dialogis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sektor Teknologi Informasi Komunikasi

Membangun dan mengembangkan TIK Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik secara transparan dan akuntabel.

Sektor Persandian

Membangun dan mengembangkan SDM Aparatur Pemerintah khususnya di bidang Persandian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik yang sehat dan aman. Membangun fasilitas dan perangkat persandian untuk mendukung operasional pelaksanaan persandian di sector pemerintahan.

Review Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsinya akan mewujud suatu system yang terpadu dan saling mendukung dengan sector lainnya.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah :

1. Komunikasi dan Informasi
   - Terbangunnya informasi pedesaan dan terbentuknya kelompok informasi dan komunikasi masyarakat.
   - Terwujudnya masyarakat yang sadar informasi untuk meningkatkan kualitas hidup.
   - Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang prima dan terpadu. Komunikasi yang efektif dan efesien terhadap penyelenggaraan transportasi.
   - Terwujudnya Sistim Penyiaran Aceh yang Berkeadilan, Bermartabat dan Bermanfaat.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
   - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan E-Government Pemerintah Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.
   - Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan mengembangkan Telematika Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi untuk akses informasi baik secara Regional, Nasional maupun Global.
   - Tersedianya fasilitas penyediaan portal website, pengisian data ke dalam data base oleh setiap SKPA secara online dan terciptanya pelayanan terhadap para pengguna jasa telematika secara berkualitas, efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

A. Program

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian, yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
9. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
10. Program Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
11. Program Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
12. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
13. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

14. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
15. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebiajkan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada.

Untuk merealisasikan program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
14. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
15. Pelayanan Informasi Publik
16. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
17. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
18. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
19. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
20. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
21. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

22. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
23. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
24. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
25. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
27. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
			42.381.750.326
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**22.044.910.454**
1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**486.834.000**
02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPA	486.834.000
1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**13.793.646.107**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	13.793.646.107
1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**2.223.938.960**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	43.567.934
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	1.401.612.084
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	112.091.942
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	27.000.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	639.667.000
1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3.718.269.112**
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	32.835.592
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	1.218.953.520
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	2.466.480.000
1.09	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.822.222.275**
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	849.530.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	612.896.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	359.796.275
02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**6.693.494.472**
1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**		**6.693.494.472**
02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.350.000.000
05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	2.104.750.472
06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	600.000.000
08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	110.600.000
10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah Aceh	206.920.000
11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	2.321.224.000

03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**12.725.739.000**
1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**500.000.000**
03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	500.000.000
1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**		**12.225.739.000**
01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi EGovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	531.200.000
03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	1.636.814.000
04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	7.081.300.000
07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi EGovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta	1.756.425.000
09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1.020.000.000
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	200.000.000
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**599.074.400**
1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**		**599.074.400**
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	599.074.400
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**318.532.000**
1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**		**318.532.000**
01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	318.532.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh merupakan tahap awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022, dimana tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJM periode 2017-2022. Program dan kegiatan di tahun 2022 tetap mengacu kepada Kebijakan Nasional sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Aceh yaitu pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi. Upaya pembenahan implementasi perencanaan dimulai dengan konsistensi penanganan urusan yang menjadi wewenang Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh namun tetap berupaya menuntaskan kegiatan terbengkalai. Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme penanganan pengawasan pembangunan secara berkala. Diharapkan dengan kegiataan ini akan tercapai peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja jaringan komunikasi, informatika dan persandian. Selanjutnya dalam bidang informasi dan komunikasi, pemerintah Aceh berupaya meningkatkan kinerja pelayanan sistem teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan pengaplikasian program dan kegiatan berbasis e-government, dan upaya meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi berbasis media cetak dan penyiaran.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2017 - 2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2021 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diharapkan mampu mencapai tingkat capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh di Tahun berjalan 2021 dan perencanaan strategi sesuai program dan kegiatan di tahun 2022 serta menetapkan berbagai kebijakan serta solusi dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh saat ini.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya akan mewujudkan suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sektor lainnya. Berhasilnya pelaksanaan Renja Tahun 2021 ini secara konsekuen dan penuh tanggung jawab sangat tergantung kepada sumber daya manusia, partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya, serta pada sikap mental dan semangat ketaatan dan disiplin bagi seluruh aparatur pemerintah baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Diskominsa Aceh ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi posirif bagi upaya Pemerintah Aceh dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipasif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan.

Proses penyusunan dokumen Renja ini telah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu partisipatif, bottom up, top down, teknokratik dan politik. Dengan pendekatan tersebut telah dilakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahapan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Dokumen ini merupakan referensi utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2022. Semoga hasil dari Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat menghasilkan suatu rumusan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan yang lebih konkrit dan realitas.

Tabel T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA TAHUN 2020

PROVINSI ACEH

Nama SKPD : **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Progam (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progam dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								
01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cetak Dokumen Perencanaan Honorarium ASN dan Non ASN Makan dan Minum Lembur ASN Uang Lembur ASN	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	90%
01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan materai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Honorarium Non ASN Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.09	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan Kenderaan Dinas, Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								
02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**								
02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah Aceh	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	90%
02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								
03.1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								
03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								
03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	100%	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	90%
03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%
03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Progam (Renstra SKPD) Tahun 2017-2022	Target dan Realisasi Kinerja Progam dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progam dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								
02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**								
02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	35 Data	35 Data	35 Data	90%	35 Data	35 Data	80%
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								
02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**								
02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	46 SKPA	46 SKPA	46 SKPA	90%	46 SKPA	46 SKPA	80%

TABEL T-C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK			Target Renstra SKPA		Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
			2019 (n-2)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	2023 (n+1)	
1	Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa	Jumlah	500	700	800	900	700	800	900	900	**Target Tercapai**
2	Jumlah Mas Media yang memuat berita	Jumlah	9	10	10	10	10	10	10	10	**Target Tercapai**
3	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Orang	180	190	200	220	190	200	220	250	**Target Tercapai**
4	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online)	Jumlah	600	700	800	900	700	800	900	900	**Target Tercapai**
5	Jumlah Informasi Publik yang diakses	Jumlah	250	300	350	400	300	350	400	400	**Target Tercapai**

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2021
PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	Rancangan awal RKPA					KODE	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				
01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ACEH	Cetak Dokumen Perencanaan Honorarium ASN dan Non ASN Makan dan Minum Lembur ASN Uang Lembur ASN	50 Dokumen	486.834.000	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	ACEH	Cetak Dokumen Perencanaan Honorarium ASN dan Non ASN Makan dan Minum Lembur ASN Uang Lembur ASN	50 Dokumen	
01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ACEH	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12 Bulan	13.793.646.107	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ACEH	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12 Bulan	
01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ACEH	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	12 Bulan	43.567.934	01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ACEH	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	12 Bulan	
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ACEH	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	12 Bulan	1.401.612.084	01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ACEH	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	12 Bulan	
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ACEH	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	112.091.942	01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ACEH	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ACEH	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	27.000.000	01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ACEH	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ACEH	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultas	12 Bulan	639.667.000	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ACEH	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultas	12 Bulan	
01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ACEH	Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan materai	12 Bulan	32.835.592	01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ACEH	Pengiriman Surat Dinas dan Pengadaan materai	12 Bulan	
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ACEH	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	1.218.953.520	01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ACEH	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ACEH	Penyediaan Honorarium Non ASN Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 Bulan	2.466.480.000	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ACEH	Penyediaan Honorarium Non ASN Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih dan nyaman	12 Bulan	
01.1.09	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					01.1.09	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ACEH	Penyediaan Jasa Perizinan Kenderaan Dinas, Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	849.530.000	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ACEH	Penyediaan Jasa Perizinan Kenderaan Dinas, Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	12 Bulan	
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ACEH	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	612.896.000	01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ACEH	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ACEH	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	359.796.275	01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ACEH	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				
02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**					02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**				
02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Bulan	1.350.000.000	02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Bulan	

KODE	Rancangan awal RKPA					KODE	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	
02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	12 Bulan	2.104.750.472	02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Publikasi Pemerintah Aceh	12 Bulan	
02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	12 Bulan	600.000.000	02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan PPID Utama	12 Bulan	
02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	12 Bulan	110.600.000	02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Peliputan Pemerintah Aceh	12 Bulan	
02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah Aceh	5 Kegiatan	206.920.000	02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Informasi Pemerintah Aceh	5 Kegiatan	
02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	12 Bulan	2.321.224.000	02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	ACEH	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	12 Bulan	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				
03.1.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**					**03.1.01**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**				
03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	ACEH	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Bulan	500.000.000	03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	ACEH	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Bulan	
03.1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**					**03.1.02**	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**				
03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	531.200.000	03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	
03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	ACEH	Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	1.636.814.000	03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	ACEH	Honorarium Petugas Ruang Server Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center Pemerintah Aceh	12 Bulan 7 Lisensi 6 Kegiatan	
03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	ACEH	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	12 Bulan	7.081.300.000	03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	ACEH	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Pemerintah Daerah	12 Bulan	
03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	1.756.425.000	03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Egovernment yang memiliki manfaat bagi Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota serta Masyarakat	12 Bulan	
03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	12 Bulan	1.020.000.000	03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	ACEH	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	12 Bulan	
03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	ACEH	Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	200.000.000	03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	ACEH	Tersedianya Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				
02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**					**02.1.01**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**				
02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	ACEH	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	35 Data	599.074.400	02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	ACEH	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan	35 Data	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				
02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**					**02.1.01**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**				
02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	ACEH	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	46 SKPA	318.532.000	02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	ACEH	Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Persandian	46 SKPA	

TABEL T-C.32.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2021

PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh

No	Progam / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**43,482,079,776**					**62,145,218,286**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**22,966,120,577**					**26,935,189,553**
2	**16**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**486,834,000**					**559,859,100**
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	TErsedianya Dokumen Lakip, LPPA,LKPJ, PK Berjenjang SKPA Tersedianya Dokumen Rencana Kerja SKPA Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	4 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	9 Dokumen	486,834,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100 %	559,859,100
2	**16**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**14,451,805,504**					**15,862,693,023**
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	14,451,805,504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100 %	15,862,693,023
2	**16**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,884,601,238**					**3,201,317,228**
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Peralatan kelistrikan perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	50,103,124	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	57,618,593
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,035,406,172	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	2,035,000,000
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	128,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	128,905,733
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Bahan Bacaan di Lingkungan Perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	31,091,942	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	54,050,000
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPA	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	640,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	925,742,902

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**16**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**656,610,723**					**1,022,110,723**
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Kursi, Meja Kerja, Meja Rapat, Lemari Arsip untuk kelancaran melaksanakan tugas kedinasan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	195,500,000
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Peralatan dan mesin untuk kebutuhan kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	1 Unit	12 Bulan	426,610,723	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	626,610,723
2	16	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perkantoran	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	1 Unit	12 Bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	200,000,000
2	**16**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,718,269,112**					**4,276,009,479**
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat kebutuhan kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kebutuhan kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	32,835,592	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	37,760,931
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Kebutuhan kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	1,218,953,520	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	1,401,796,548
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Honorarium Non ASN	Tersedianya Jasa Penunjang Kebutuhan kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	2,466,480,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	2,836,452,000
2	**16**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,768,000,000**					**2,013,200,000**
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	33 Unit	12 Bulan	928,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	1,067,200,000
2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Pemeliharaan Mebel Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	46,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	400,000,000
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 %	3 Gedung	12 Bulan	600,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100 %	500,000,000
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**8,625,226,204**					**11,819,988,419**
2	**16**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**								**8,625,226,204**					**11,819,988,419**
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Terlaksananya Bimtek tenaga pengendalian Opini Publik SKPA Terlaksananya FGD Ngobrol Seputar Opini Terlaksananya Jaring Opini Publik Kab/Kota Terlaksananya Kordinasi Teknis Terlaksananya Penyusunan Pergub Pengelolaan Aduan Masyarakat dan Pergub Penyebaran informasi (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Opini Publik) Terlaksananya Rakor perumusan kebijakan pengendalian Opini Publik Terlaksananya Survey Pendapat umum	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	1 Kegiatan 5 kegiatan 3 kegiatan 4 Kegiatan 2 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	100 %	479,031,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	1,032,753,935
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Tersedianya konten informasi berkaitan dengan program dan agenda kebijakan pimpinan daerah	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	5 Video	100 %	235,000,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	270,250,000
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Terlaksana kegiatan publikasi dan diseminasi informasi Pemerintah Aceh melalui media luar ruang (Baliho dan Spanduk) Terlaksana kegiatan publikasi dan diseminasi informasi Pemerintah Aceh melalui media online Tersedia sarana pendukung pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	3000 Meter 76 Tayangan 10 Unit	100 %	552,750,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	689,252,500
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Aduan	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas	Kota Banda Aceh,	100 % / %	1 kegiatan 1 kegiatan	100 %	1,730,000,000	Dana Otonomi		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas	100 % / %	2,219,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Masyarakat SP4N Lapor Terlaksananya Bimtek PPID SKPA Terlaksananya Cetak Buku Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Aceh Terlaksananya Cetak Buku Peraturan perundang-undangan Terlaksananya FGD Integrasi Informasi Publik Terlaksananya Forum Koordinasi PPID se Aceh Terlaksananya Honorarium Layanan PPID Terlaksananya Honorarium Tim Aduan Masyarakat (SP4N Lapor) Terlaksananya Honorarium Tim Integrasi Pengelolaan Informasi Publik Terlaksananya Koordinasi Teknis KI Pusat, Kemendagri Dan Kemenkominfo Terlaksananya Koordinasi teknis Pengelolaan Informasi Publik ke Arsip Nasional Terlaksananya Kortek Pengelolaan Aduan Masy Kemenkominfo dan Kemen PAN Terlaksananya Pemeringkatan Badan Publik oleh KI Pusat Terlaksananya Pendampingan pengelolaan Informasi Publik Kab/Kota Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Publik Terlaksananya Pendampingan PPID Gampong Terlaksananya Pendampingan PPID Kab/Kota Terlaksananya Pendampingan PPID SKPA Terlaksananya Penyusunan SOP kearsipan Data dan Informasi Publik Terlaksananya Publikasi Layanan Aduan Masyarakat SP4N Lapor Terlaksananya Rakor PPID SKPA	Informasi Publik	Baiturrahman Kampung Baru		1 paket 1 Paket 2 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 10 Bulan 10 Bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 46 SKPA 3 Kab/kota 5 kegiatan 46 SKPA 1 kegiatan 1 Tahun 5 kegiatan 2 kegiatan 1 Tahun			Khusus		Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Terlaksananya Rakor Teknis SP4N Lapor SKPA Terlaksananya Sosialisasi Layanan aduan, Perguruan Tinggi, Sekolah dan Gampong											
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Iklan Radio dan Siaran Langsung Radio Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Ngobrol di Radio Lagi Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Pariwara Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Siaran Langsung Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Tabloid Info Aceh Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Talkshow TV Tersedianya sarana pendukung kegiatan Tim Media Center Pemerintah Aceh	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	11 Kali 11 Kali 4 Kali 1 Kali 6 Edisi 2 Kali 15 Unit	100 %	800,200,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	1,457,750,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Terlaksananya Pembentukan, Pembinaan serta Penguatan Kelompok Informasi Gampomg (KIG) Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Iklan Radio dan Siaran Langsung Radio Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Ngobrol di Radio Lagi Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Pariwara Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Siaran Langsung Tersampaikannya diseminasi dan layanan informasi dan kerjasama dengan komunitas/mitra media elektronik dan cetak melalui Talkshow TV Tersedianya sarana pendukung kegiatan Tim Media Center Pemerintah Aceh	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	2 Kabupaten 11 Kali 11 Kali 4 Kali 1 Kali 2 Kali 15 Unit	100 %	156,600,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	180,090,000
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Terlaksananya Bimtek Mediator Terlaksananya Diskusi Rutin Terlaksananya Fasilitasi Dialog Masyarakat (fase Pre Krisis, Crisis Respon, Post Krisis) Terlaksananya Honorarium Tim Ahli Terlaksananya Honorarium Tim Sekretariat Terlaksananya Kordinasi dan Pendampingan Masyarakat ke Kementerian Terkait	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	1 kegiatan 12 Bulan 1 Tahun 10 Bulan 10 Bulan 1 kegiatan	100 %	555,000,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	1,006,250,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Tersampainya informasi kepada masyarakat Tersedianya sumber daya jurnalis desa Tersedianya wartawan yang bersertifikasi	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	8 Kali 50 Orang 40 Orang	100 %	410,143,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	471,664,450
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Terlaksananya Kegiatan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	12 Bulan	100 %	3,000,000,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	3,680,000,000
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Tersampaikannya pemberitaan dan agenda pimpinan daerah ke publik secara nasional Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	5000 Berita 2 Unit	100 %	556,502,204	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	754,977,534
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Layanan Informasi	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100 % / %	1 Paket	100 %	150,000,000	Dana Otonomi Khusus		Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik / Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan e-Government dan terintegrasi	100 % / %	57,500,000
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**11,890,732,995**					**23,390,040,314**
2	**16**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								**1,673,507,831**					**4,206,853,287**
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Tersedianya Lisensi SSL selama 2 tahun Tersedianya Nama domain .go.id Tersedianya Nama domain *.id Tersedianya Virtual Private Server (VPS) selama 24 Bulan	Tersedianya ASN yang terlatih di bidang TIK	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	4 Lisensi 1 Domain 20 Domain 1 VPS	220 ASN	193,817,700	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	222,890,355
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Jumlah SDM ASN Terlatih dalam Pengelolaan Domain Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan subdomain	Tersedianya ASN yang terlatih di bidang TIK	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	46 orang 6 Kab/Kota	220 ASN	125,740,000	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	144,601,000
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Terjaminnya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tersedianya Master Plan TIK	Tersedianya ASN yang terlatih di bidang TIK	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	119 Titik 1 Dokumen	220 ASN	1,353,950,131	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	3,839,361,932
2	**16**	**03**	**1.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								**10,217,225,164**					**19,183,187,027**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Meningkatnya Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh Tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan SPBE Provinsi Tersedianya Rekomendasi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Keras SPBE	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	3.2 Indeks 1 rekomendasi 2 rekomendasi	47 SKPA	356,200,000	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	409,630,000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Jumlah SKPA yang mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik Terlaksananya Rapat Koordinasi Singkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	47 SKPA 1 kali	47 SKPA	50,000,000	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	57,500,000
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Bandwidth Pemerintah Aceh Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan Terlaksana Pemeliharaan Jaringan dan Server	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	700 Mbps 9 Lisensi 77 Perangkat	47 SKPA	6,485,584,271	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	14,661,800,000
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Terlaksananya Warkshop Discovery Data dan Bimtek Pengelolaan Open Data di lingkungan Pemerintah Aceh	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	3 Kegiatan	47 SKPA	235,000,000	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	270,250,000
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Jumlah ASN Yang mengikuti Bimtek Aplikasi Umum/Khusus dan Workshop bidang TIK Tersedianya Aplikasi khusus Pemerintah Aceh	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	220 orang 18 Aplikasi	47 SKPA	1,768,857,649	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	2,149,186,296
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Terlaksananya Workshop Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan dan Bimtek Integrasi Data	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	4 Kegiatan	47 SKPA	100,000,000	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	115,000,000
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Jumlah SDM ASN yang mengikuti Workshop Bidang TIK Tersedianya Dokumen Rencana Induk Smart City Kabupaten Kota	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	354 orang 2 Dokumen	47 SKPA	474,150,000	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	660,272,500
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Tersedianya Pedoman (SOP) Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	1 Dokumen	47 SKPA	125,000,000	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	143,750,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	1 rekomendasi 2 Peraturan	47 SKPA	347,800,000	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	399,970,000
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Terlaksananya monev dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi Tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan Ekosistem SPBE Pemerintah Provinsi	Tersedianya Jaringan Internet dan Aplikasi untuk Seluruh SKPA	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	220 Orang	23 Kab/Kota 12 unit	47 SKPA	274,633,244	Dana Otonomi Khusus		Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	220 Orang	315,828,231
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**967,920,224**					**1,343,108,258**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**967,920,224**					**1,343,108,258**
2	**20**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**								**967,920,224**					**1,343,108,258**
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan melalui Data Statistik dan Geospasial Pemerintah Aceh	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan melalui Data Statistik dan Geospasial Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	900 / 400 Jumlah / Jumlah	20 Data	20 Data	141,734,224	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	900 / 400 Jumlah / Jumlah	292,008,258
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	Tersedianya SDM yang kompetitif, berkualitas dan profesional	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan melalui Data Statistik dan Geospasial Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	900 / 400 Jumlah / Jumlah	2 Kegiatan	20 Data	142,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	900 / 400 Jumlah / Jumlah	172,500,000
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	Tersedianya Metadata Satatistik Sektoral dan Geospasial Tersedianya Metadata Satatistik Sektoral dan Geospasial	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan melalui Data Statistik dan Geospasial Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	900 / 400 Jumlah / Jumlah	12 Metadata 15 Metadata	20 Data	148,800,000	Dana Otonomi Khusus		Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	900 / 400 Jumlah / Jumlah	345,000,000
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	Terciptanya Program Kelembagaan yang efektif guna menunjang Peningkatan Bidang Geospasial Terciptanya Program Kelembagaan yang efektif guna menunjang Peningkatan Bidang Statistik	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan melalui Data Statistik dan Geospasial Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	900 / 400 Jumlah / Jumlah	3 Orang 3 Orang	20 Data	283,536,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	900 / 400 Jumlah / Jumlah	303,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Aceh
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	Tercapainya Informasi yang Efektif tentang Otorisasi Statistik dan geospasial	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan melalui Data Statistik dan Geospasial Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	900 / 400 Jumlah / Jumlah	2 Kegiatan	20 Data	251,200,000	Dana Otonomi Khusus		Kemudahan dan keterbukaan Akses Data dan Informasi pada masyarakat (Jumlah Pengakses Offline dan online) / Jumlah Informasi Publik yang diakses	900 / 400 Jumlah / Jumlah	230,000,000
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**650,000,000**					**838,965,046**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**650,000,000**					**838,965,046**
2	**21**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**								**539,300,000**					**711,660,046**
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	Pemberian Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Aceh di Bidang Keamanan Informasi Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Persandian dengan Badan Siber dan Sandi Negara Terselenggaranya Kegiatan Literasi Kesadaran Keamanan Informasi Bagi Mahasiswa dan Umum Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi Terselenggaranya Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi Terselenggaranya Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Adanya Peraturan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	90 %	12 Bulan 47 SKPA 1 Unit 5 Kegiatan 1000 orang 10 Kab./ Kota 10 Kab./ Kota 4 Kegiatan	1 Peraturan	423,900,000	Dana Otonomi Khusus		Persentase integrasi sistem informasi sektoral	90 %	578,950,046
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	Terselenggaranya Kegiatan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Aceh	Adanya Peraturan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	90 %	47 SKPA	1 Peraturan	115,400,000	Dana Otonomi Khusus		Persentase integrasi sistem informasi sektoral	90 %	132,710,000
2	**21**	**02**	**1.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**								**110,700,000**					**127,305,000**
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase integrasi sistem informasi sektoral	Terselenggaranya Jaring Komunikasi Sandi Dalam Rangka Pengamanan Informasi	Adanya Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	90 %	47 SKPA dan Kab./Kota	1 Peraturan	110,700,000	Dana Otonomi Khusus		Persentase integrasi sistem informasi sektoral	90 %	127,305,000
												TOTAL	**45,100,000,000**					**64,327,291,590**